



PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang yang dilaksanakan di Kantor Desa Negeri Morella, Kecamatan Laihitu Kabupaten Maluku Tengah, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK.-, 81011xxxxxx, Tempat Lahir di Mamala, tanggal 13 Oktober 1953, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Negeri Mamala, Kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK., 81011xxxxxx Tempat Lahir di Luhu, tanggal 08 September 1948, Umur 75 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Negeri Mamala, Kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 18 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 260/Pdt.P/2023/PA.Ab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 halaman penetapan Nomor 260/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam di Luhu, pada tanggal 10 Januari 1982;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir 7 (tujuh) orang Anak yang bernama:
 - a. Anak, Tempat Lahir Mamala Tanggal Lahir 27 Juli 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki Pendidikan SLTA;
 - b. Anak, Tempat Lahir Mamala Tanggal Lahir 10 Juni 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki Pendidikan SLTA;
 - c. Anak, Tempat Lahir Mamala Tanggal Lahir 10 Januari 1987, Jenis Kelamin Laki-Laki Pendidikan SLTA;
 - d. Anak, Tempat Lahir Mamala Tanggal Lahir 23 Januari 1992, Jenis Kelamin Perempuan Pendidikan SLTA;
 - e. Anak, Tempat Lahir Mamala Tanggal Lahir 07 Maret 1995, Jenis Kelamin Perempuan Pendidikan SLTA;
 - f. Anak, Tempat Lahir Mamala Tanggal Lahir 12 Juni 1999, Jenis Kelamin Laki-Laki Pendidikan SLTA;
 - g. Anak, Tempat Lahir Mamala Tanggal Lahir 21 September 2000, Jenis Kelamin Perempuan Pendidikan SLTA
3. Bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II Bapak **wali**, yang diwakili Penghulu Bapak **X** dengan Mas Kawin Uang Tunai Rp 300.000 dibayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing Bernama Bapak Saksi Nikah dan Bapak Saksi Nikah;
5. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah masih berstatus Perjaka dan Perawan;

Halaman 2 dari 9 halaman penetapan Nomor 260/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menetapkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah perkawinan **Pemohon I** dan **Pemohon II**, yang di laksanakan di Luhu, pada tanggal 10 Januari 1982 sesuai syariat Islam ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ambon sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 9 halaman penetapan Nomor 260/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Mamala, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Keluarga dan tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari tahun 1823 di Luhu, Kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menjadi wali menikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak wali (kakak kandung Pemohon II) dan yang menikahkan adalah Bapak X (Imam Masjid) dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan sebagai saksi Nikah adalah Bapak Muhamad Asawal dan bapak ib Sunet ;
- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7(tujuh) orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pengajuan permohonan ini dimaksudkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Buku Nikah;

Saksi II, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Mamala, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah keluarga dari para Pemohon ;

Halaman 4 dari 9 halaman penetapan Nomor 260/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Negeri Morella, Kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 10 Januari tahun 1982 ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah kakak kandung dari Pemohon II yang bernama Bapak wali;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Bapak X (penghulu Masjid) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Muhamad Asawala dan bapak Abdul Motalib Sunet dengan Maskawin berupa uang sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai ;
- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pengajuan permohonan ini dimaksudkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ambon selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak

Halaman 5 dari 9 halaman penetapan Nomor 260/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon didasarkan pada dalil- dalil yang menyatakan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari tahun 1982 di Luhu, Kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah, dengan dinikahkan oleh Bapak X (penghulu Masjid) dan Wali Nikah adalah kakak kandung Pemohon II Bapak (wali) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Muhamad Asawala dan Bapak Abdul Mutalib Manilet dengan Maskawin berupa uang sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya tersebut, para pemohon mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon di persidangan, secara formil Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 172 ayat 1 angka 4 R Bg), dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon (Vide Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, setelah dianalisa ditemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari tahu 1982 yang dilaksanakan di Luhu, Kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan Bapak X dan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II (wali) dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Muhamad Asawala dan Bapak Abdul Mutalib Manilet, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan

Halaman 6 dari 9 halaman penetapan Nomor 260/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari tahun 1982 di Luhu, Kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah, dapat di Istbatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan yang ditunjuk, sesuai pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan hukum Islam pada Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلَىٍّ وَشَاهِدٍ عَدِلَ

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 280 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga pernikahan para Pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 7 dari 9 halaman penetapan Nomor 260/Pdt.P/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari tahun 1982 di Luhu, Kecamatan Laihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pegadilan Agama Ambon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami, **Drs. H. Muhammad Arafah Jalil SH.MH., Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbau, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Hadija Tuhepaly, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Anwar Rahakbau, S.H., M.H.

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH.MH.,

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina, M.H.,

Panitera Pengganti

Halaman 8 dari 9 halaman penetapan Nomor 260/Pdt.P/2023/PA.Ab



Hadija Tuhepaly, S.H.I.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNPB Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)